

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SUBENO TRI LEKSONO
NIK : 3275021007660015
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jabatan : PANITERA PENGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 5 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalsas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUBENO TRI LEKSONO
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 479954

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/120 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 604 m²/99 m² di KAB / KOTA PURBALINGGA, Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 178.000.000

1. MOTOR, YAMAHA B3W-S A/T/SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA V1JO2Q32LO AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER GLS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.236.550.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.236.550.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.